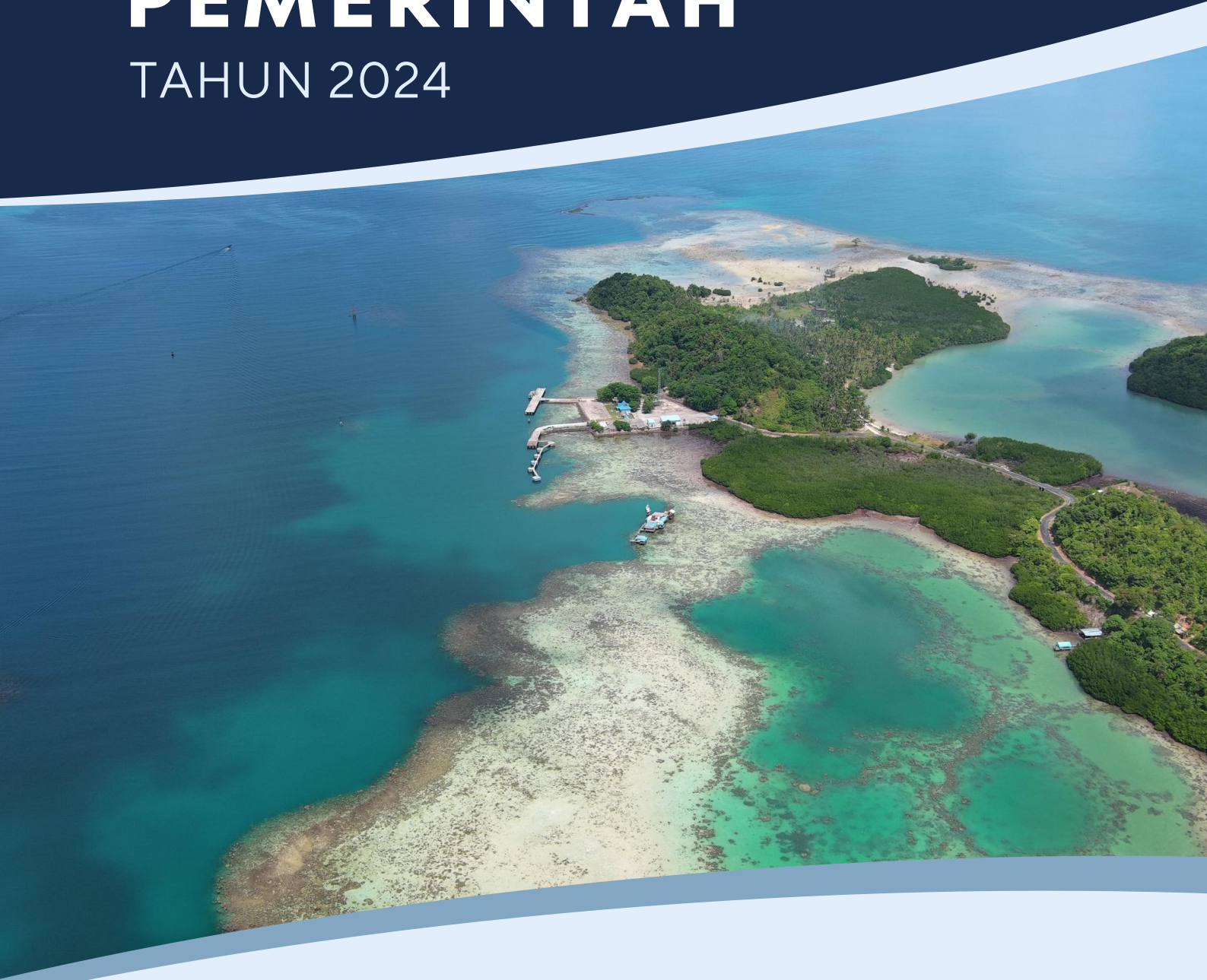




LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024



DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 disusun sebagai perwujudan kewajiban Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam pelaksanaan mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 – 2026.

Sejalan dengan hal tersebut, LKjIP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja yang disusun berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau selanjutnya disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebagai bukti akuntabilitas vertikal. Selain itu LKjIP yang merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau sebagai umpan balik untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Tanjungpinang, 21 Februari 2025

**KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**



Dr. SAID SUDRAJAD, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690504 200003 1 008

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam upaya memenuhi target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2024, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau telah mencapai Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB harga berlaku sebesar 6.052,98 Miliar Rp (sumber data BPS Kepulauan Riau 2025) dari target 3305 Miliar Rupiah. Sedangkan dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau digambarkan sebagai berikut :

1. Capaian Sasaran I "Mengoptimalkan Pengelolaan dan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan" :
 - Diukur dengan indikator kawasan konservasi yang dikelola minimum sesuai regulasi dan Persentase kasus IUU Fishing/konflik pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang diselesaikan.
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 2 program yaitu Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
 - Pada tahun 2024, target indikator Sasaran I Kawasan Konservasi Yang Dikelola Minimum sesuai Regulasi sebanyak 4 Kawasan terealisasi sebanyak 4 Kawasan dengan persentase realisasi terhadap target mencapai 100%, sedangkan target indikator Persentase kasus IUU Fishing/konflik pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang diselesaikan sebesar 90% terealisasi sebesar 100%, dengan persentase realisasi terhadap target mencapai 111%.
2. Capaian Sasaran II "Meningkatkan produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap serta meningkatkan kapasitas nelayan terkait teknologi kelautan perikanan" :
 - Diukur dengan indikator Jumlah Produksi Perikanan Tangkap, Nilai Tukar Nelayan/NTN, Jumlah Produksi Perikanan Budidaya dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan/NTPi.
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 2 program yaitu Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Program Pengelolaan Perikanan Budidaya.
 - Pada tahun 2024, target indikator Sasaran II Jumlah Produksi Perikanan Tangkap sebanyak 308.305,60 Ton terealisasi sebanyak 335.255,75 Ton dengan persentase realisasi terhadap target mencapai 108,74%, sedangkan target

indikator Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 116,0 terealisasi sebesar 105,28, dengan persentase realisasi terhadap target mencapai 90,76% namun capaian ini di atas capaian rata-rata Nasional sebesar 102,35%. Selanjutnya target indikator Jumlah Produksi Perikanan Budidaya sebanyak 30.614,00 Ton terealisasi sebanyak 39.898 Ton dengan persentase realisasi terhadap target mencapai 130,32%, sedangkan target indikator Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) sebesar 111,2 terealisasi sebesar 96,69, dengan persentase realisasi terhadap target mencapai 86,95%. Capaian ini masih dibawah capaian rata-rata Nasional sebesar 103,29%.

3. Capaian Sasaran III 'Meningkatkan daya saing dan pemasaran produk hasil perikanan " :

- Diukur dengan indikator Jumlah Produksi olahan hasil perikanan.
- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
- Pada tahun 2024, target indikator Sasaran III Jumlah Produksi olahan hasil perikanan sebanyak 13.200 Ton terealisasi sebanyak 19.692,58 Ton dengan persentase realisasi terhadap target mencapai lebih dari 100%.

Untuk mendukung pencapaian kinerja pada bidang kelautan dan perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2024 memperoleh anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar **Rp. 69.852.198.766,00** yang didukung dengan 6 Program dan 16 Kegiatan. Adapun realisasi anggaran sebesar **Rp. 67.669.229.735,83** dengan persentase capaian sebesar **96,87 %**. Sedangkan anggaran APBN Tahun 2024 dari 6 Satuan Kerja Tugas Pembantuan setelah rasionalisasi sebesar **Rp. 1.822.629.000** dengan realisasi sebesar **Rp. 1.791.963.131** dengan persentase capaian sebesar 98,32%.

Untuk mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang lebih baik di masa datang diperlukan perencanaan yang dapat mengakomodasi semua kebutuhan pelaku utama (nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil perikanan), anggaran yang lebih besar, sumberdaya manusia yang kompeten dan keterpaduan seluruh sektor serta dukungan dan koordinasi yang harmonis dari semua pihak guna tercapainya target kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau.

DAFTAR ISI



	Halaman
KATA PENGANTAR	1
IKHTISAR EKSEKUTIF	2
DAFTAR ISI	4
DAFTAR TABEL	5
DAFTAR GRAFIK	6
DAFTAR GAMBAR	7

	Halaman
BAB I. PENDAHULUAN	8
1.1. Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah	8
1.2. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan.....	10
1.3. Isu Strategis	12
1.4. Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM)	13
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	15
2.1. Perjanjian Kinerja	16
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	20
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2024	20
3.2. Akuntabilitas Anggaran	32
BAB IV. PENUTUP	43
4.1. Kesimpulan	43
4.2. Rekomendasi	45
LAMPIRAN	47

DAFTAR TABEL

TABEL	Halaman
2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Prov.Kepri Tahun 2021-2026	16
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kep.Riau.....	17
2.3. Anggaran Program pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kep. Riau Tahun Anggaran 2024.....	18
2.4. Anggaran Tugas Pembantuan pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kep. Riau Tahun Anggaran 2024	19
3.1. Skala Ordinal Pengukuran Kinerja Utama	20
3.2. Pencapaian Indikator Kinerja pada Dinas Kelautan dan Perikanan Prov.Kepulauan Riau Tahun 2024.....	22
3.3. Pengukuran Capaian Sasaran I.....	22
3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2023 pada Sasaran I	23
3.5. Pengukuran Capaian Sasaran II	25
3.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2023 pada Sasaran II	25
3.7. Realisasi Nilai Tukar Nelayan	28
3.8. Pemberian Bantuan Sarpras Perikanan Tangkap Tahun 2024	30
3.9. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	31
3.10. Realisasi Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	34
3.11. Pemberian Bantuan Sarpras Perikanan Budidaya Tahun 2024	36
3.12. Pengukuran Capaian Sasaran III	37
3.13. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2023 pada Sasaran III	37
3.14. Pemberian Bantuan Cooler Box Tahun 2024	38
3.15. Pengukuran Capaian Sasaran IV	38
3.16. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2023 pada Sasaran IV	39
3.17. Perbandingan Realisasi Kinerja 4 Tahun Terakhir pada Sasaran IV ...	40
3.18. Anggaran dan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2024	41
3.19. Anggaran dan Realisasi pada masing-masing Sub Unit Kerja	41
3.20. Anggaran dan Realisasi APBN T.A. 2024	42

DAFTAR GRAFIK

GRAFIK	Halaman
1.1. Cascading Kinerja	8
1.2. Bagan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri	10
3.1. Trend Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB ADHB	21
3.2. Grafik Tren Produksi Perikanan Tangkap	26
3.3. Grafik Perbandingan Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Nasional	27
3.4. Grafik Trend Nilai Tukar Nelayan (NTN)	28
3.5. Perbandingan Nilai Tukar Nelayan (NTN) Nasional	29
3.6. Grafik Trend Produksi Perikanan Budidaya	32
3.7. Perbandingan Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Nasional	33
3.8. Grafik Tren Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	34
3.9. Perbandingan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) Nasional	35

DAFTAR GAMBAR



GAMBAR	Halaman
1.1. Cascading Kinerja	9
1.2. Bagan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri	11
1.3. Formasi Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri Tahun 2024 berdasarkan Golongan.....	13
1.4. Formasi Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri Tahun 2024 berdasarkan Tingkat Pendidikan	14
3.1. Capaian Indikator Kinerja Tujuan Terhadap Target	21

Tahun 2024 merupakan Tahun III (ketiga) pelaksanaan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026. Dalam melakukan pembangunan urusan kelautan dan perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan Visi Gubernur Kepulauan Riau yang bertajuk: **"Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya"** yang dilaksanakan melalui pendekatan Misi Ke-1 yaitu **"Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat"**.

Pelaksanaan Penyusunan LkjIP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 merupakan pelaporan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang memanfaatkan segala sumber daya dan juga dana, sehingga harus dapat dipertanggungjawabkan dari aspek akuntabilitas kinerja dan juga keuangan. Hal ini sebagai wujud dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Untuk itu perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau telah berupaya dalam melakukan praktik *good governance* dengan melakukan perbaikan secara terus menerus, dan berperan sebagai agen perubahan dalam manajemen pembangunan Kelautan dan Perikanan di Provinsi Kepulauan Riau yang selalu meningkatkan sinergitas bersama masyarakat dan dunia usaha. Maka dari itu, dalam praktik *good governance* diperlukan penilaian indikator keberhasilan kinerja sebagai bentuk tanggung jawab pelaksanaannya.

Adapun Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

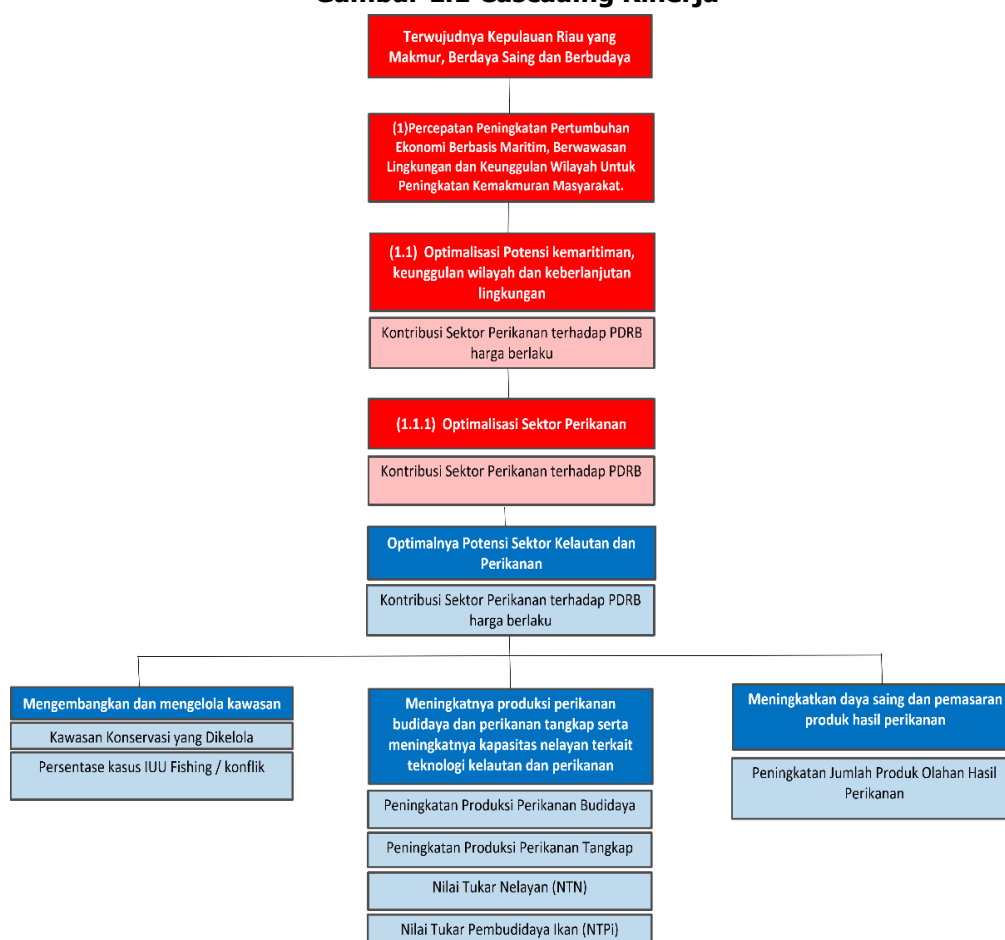
1. Menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang.
2. Memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah daerah.

3. Memberikan informasi kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasar pada peraturan perundangan, kebijakan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

1.1. Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021–2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021–2026. Adapun skema cascading pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :

Gambar 1.1 Cascading Kinerja



1.2. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau dalam mewujudkan kinerja urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan memiliki fungsi sebagai berikut :

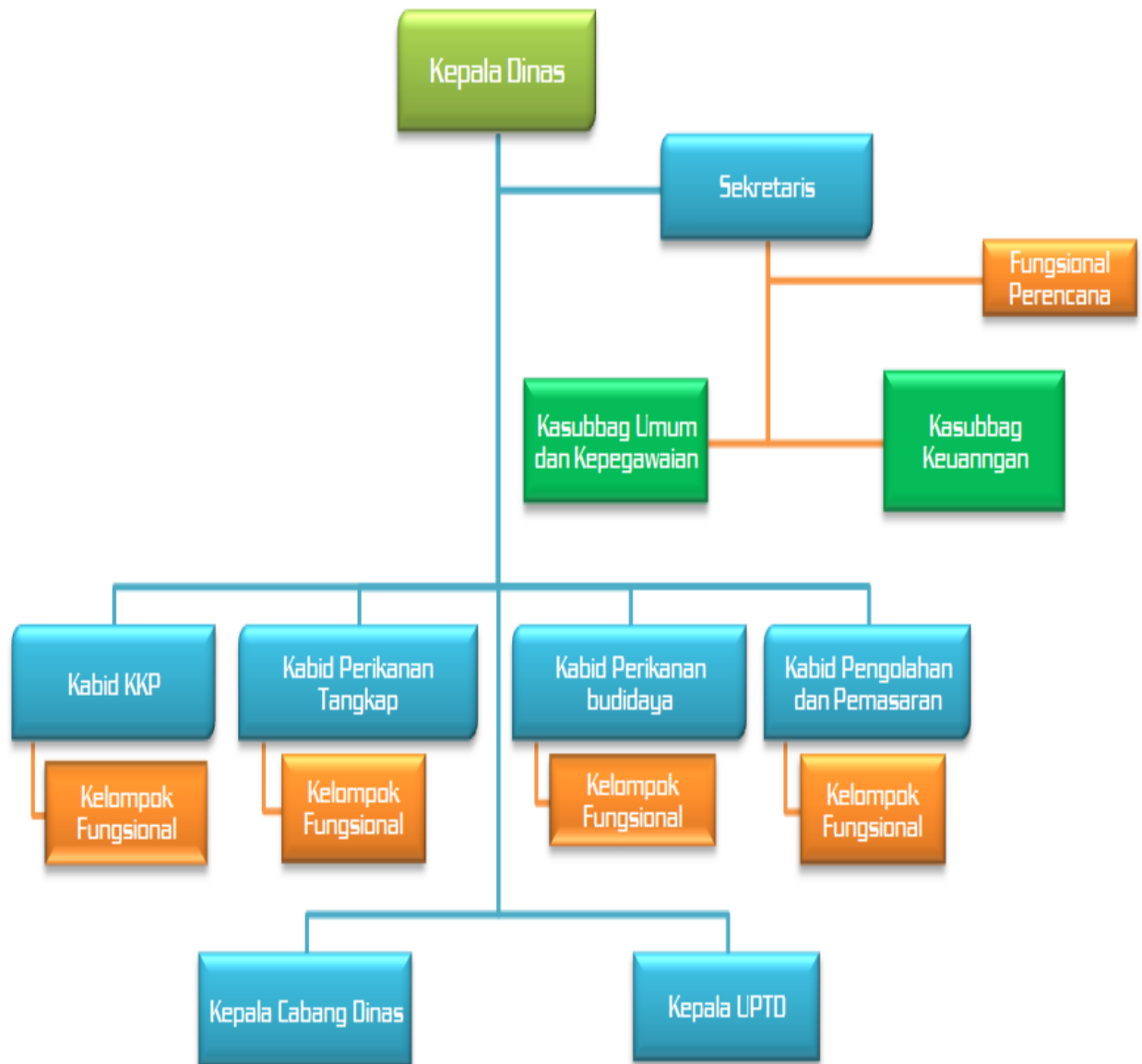
1. Perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Kelautan, Konservasi dan Pengawasan, Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran, Cabang Dinas Kelautan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Kelautan, Konservasi dan Pengawasan, Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran, Cabang Dinas Kelautan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Kelautan, Konservasi dan Pengawasan, Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran, Cabang Dinas Kelautan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sekretariat, Kelautan, Konservasi dan Pengawasan, Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran, Cabang Dinas Kelautan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
5. Penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;
6. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya;
7. Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau dibantu oleh organisasi dan unit kerja yang terdiri dari unsur dinas dengan bidang-bidang, cabang dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah. Adapun struktur Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat;
2. Bidang Kelautan, Konservasi dan Pengawasan;
3. Bidang Perikanan Tangkap;
4. Bidang Perikanan Budidaya;
5. Bidang Pengolahan dan Pemasaran;

6. Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Anambas;
7. Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Natuna;
8. Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Karimun;
9. Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Lingga
10. Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Batam;
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Ikan;
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan ;
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pelabuhan Perikanan;
14. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.2 Bagan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri



1.3. Isu Strategis

Dalam melaksanakan tugas pembangunan di bidang kelautan dan perikanan serta untuk mencapai tujuan daerah dalam "Optimalisasi Potensi Kemaritiman, Keunggulan Wilayah dan Keberlanjutan Lingkungan" masih didapati kondisi dan hal yang menjadi isu dalam pelaksanaan pembangunan. Untuk itu, dalam upaya menjaga eksistensi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan pembangunan maka diperlukan respon terhadap isu yang sedang mengemuka pada tahun berkenaan melalui kebijakan, inovasi dan tindakan yang tepat. Adapun beberapa isu strategis yang didapati adalah sebagai berikut:

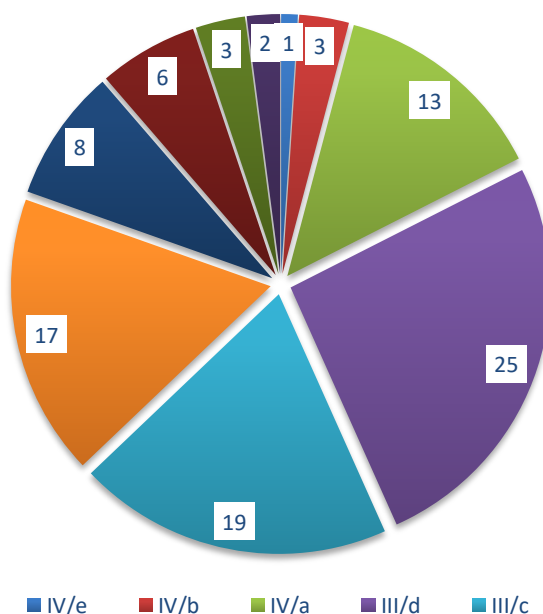
1. Untuk mendukung implementasi Penangkapan Ikan Terukur (PIT), Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan saat ini hanya memiliki 1 Pelabuhan Perikanan di Antang, Kabupaten Kepulauan Anambas. Untuk itu, telah diusulkan pembangunan awal Pelabuhan perikanan Tahap I melalui mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2025 di Pelabuhan Perikanan Batu Duyung di Kabupaten Bintan.
2. Pengembangan pengelolaan perikanan budidaya khususnya pada komoditas rumput laut telah didukung melalui tersedianya dokumen pemetaan pengelolaan budidaya rumput laut dengan daerah yang eksis dalam produksi rumput laut meliputi Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga dan Kota Batam. Hal ini membuka peluang terhadap perluasan lahan yang baik dalam aktivitas budidaya rumput laut. Sejalan dengan hal tersebut, produksi perikanan budidaya juga diprediksi akan mengalami peningkatan.
3. Pasca ditetapkannya Kawasan konservasi perairan di Wilayah Bintan melalui Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 18 Tahun 2022 seluas 138.561,42 Ha dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 87 Tahun 2024 seluas 843.609,30 Ha , Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus berperan aktif dalam mengoptimalkan kawasan konservasi dengan melaksanakan Pembangunan Kantor Konservasi yang berlokasi di Desa Malangrapat, Bintan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2023. Selanjutnya, pemanfaatan zona-zona dalam kawasan konservasi ini akan dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau melalui UPTD Kantor Konservasi ini, khususnya dalam meningkatkan pendapatan daerah. Untuk kawasan pencadangan konservasi lainnya di Kota Batam, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Natuna masih dilakukan upaya untuk memperoleh penetapan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI.

4. Dalam mengelola dan menjaga sumber daya kelautan dan perikanan di kawasan perairan Kepulauan Riau telah dilakukan berbagai upaya yang meliputi pengawasan terpadu di laut, dan pengawasan terpadu di darat. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kendala dan pelanggaran seperti penangkapan secara ilegal (*illegal fishing*), penangkapan ikan tanpa izin (Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan/SIUP, Surat Izin Penangkapan Ikan/SIPI, dan Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan/SIKPI), memiliki izin tapi melanggar ketentuan yang telah ditetapkan (pelanggaran daerah penangkapan ikan, pelanggaran ketaatan berpangkalan), pemalsuan/manipulasi dokumen (dokumen pengadaan, dokumen registrasi kapal, dan perizinan kapal), dan penangkapan ikan yang merusak (*destructive fishing*) dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara dan/atau bangunan yang membahayakan kelestarian sumber daya ikan.

1.4. Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau ditopang dengan sumber daya manusia (SDM) sebanyak 306 orang yang terdiri dari 98 orang PNS, 6 Orang PPPK, 89 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan 110 orang Tenaga Harian Lepas (THL) per 31 Desember 2024. Dari 98 orang PNS pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau yang menduduki jabatan struktural sebanyak 35 orang dengan rincian Pejabat eselon II sebanyak 1 orang, Pejabat Eselon III sebanyak 13 orang dan Pejabat Eselon IV sebanyak 21 orang.

JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN



Gambar 1.3 . Formasi Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri Tahun 2024 berdasarkan Golongan

Berdasarkan golongan Dinas Kelautan dan Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari pegawai Golongan IV/e sebanyak 1 orang, Golongan IV/b sebanyak 3 orang Golongan IV/a sebanyak 14 orang, Golongan III/d sebanyak 25 orang, Golongan III/c sebanyak 19 orang, Golongan III/b sebanyak 17 orang, Golongan III/a sebanyak 8 orang, Golongan II/d sebanyak 6 orang, Golongan II/c sebanyak 3 orang, Golongan II/b sebanyak 2 orang dan tidak ada pegawai Golongan I/a.

Selanjutnya berdasarkan tingkat pendidikan, dari 98 PNS pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, masing-masing memiliki latar belakang pendidikan yang beragam dari SD hingga Doktor, dengan rincian sebagai berikut : Doktor (S3) sebanyak 1 orang, Pascasarjana (S2) sebanyak 19 orang, Sarjana (S1/DIV) sebanyak 61 orang, Diploma III sebanyak 9 orang dan SMA sebanyak 8 orang.



Gambar 1.4. Formasi PNS Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri Tahun 2024 berdasarkan Tingkat Pendidikan

B A B I I

P E R E N C A N A A N K I N E R J A

Menjabarkan misi ke-1 Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 yang berkaitan dalam pembangunan kelautan dan perikanan, yakni **“Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat”** maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah Optimalisasi Kualitas Perekonomian Sektor Perikanan.

Dari tujuan diatas, maka telah ditetapkan sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau sebagai penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara cepat oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Sasaran yang ditentukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau menggambarkan hal yang akan dicapai dalam satu tahun melalui tindakan-tindakan yang dilakukan untuk dicapai pada 5 (lima) tahun mendatang.

Sasaran-sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau dirumuskan untuk tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan Pengelolaan dan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
2. Meningkatkan produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap serta meningkatkan kapasitas nelayan terkait teknologi kelautan perikanan;
3. Meningkatkan daya saing dan pemasaran produk hasil perikanan; dan
4. Meningkatkan kualitas pengawasan, perencanaan, pengelolaan, dan keuangan pembangunan yang terpadu dan akuntabel.

Berdasarkan rumusan misi yang telah dijelaskan sebelumnya, penjabaran ke dalam tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri pada tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan
Prov.Kepri Tahun 2021-2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Optimalisasi Kualitas Perekonomian Sektor Perikanan	Mengoptimalkan Pengelolaan dan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Kawasan Konservasi yang Dikelola
		Persentase kasus IUU Fishing/konflik pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang diselesaikan
	Meningkatkan produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap serta meningkatkan kapasitas nelayan terkait teknologi kelautan perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap
		Nilai Nelayan/Tukar NTN
		Jumlah produksi perikanan budidaya
	Meningkatkan daya saing dan pemasaran produk hasil perikanan	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan/NTPi
		peningkatan jumlah Produk olahan hasil perikanan
Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan kualitas pengawasan, perencanaan, pengelolaan, dan keuangan pembangunan yang terpadu dan akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor

2.1. PERJANJIAN KINERJA

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 merupakan perencanaan jangka menengah yang selanjutnya perlu dijabarkan menjadi rencana tahunan dalam bentuk Perjanjian Kinerja. Penyusunan Perjanjian Kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026 maka dapat dilihat sasaran dan target pembangunan kelautan dan perikanan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kep.Riau

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
Mengoptimalkan Pengelolaan dan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Kawasan Konservasi yang Dikelola minimum	4
	Persentase kasus IUU Fishing/konflik pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang diselesaikan	90
Meningkatkan produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap serta meningkatkan kapasitas nelayan terkait teknologi kelautan perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)	308.305,60
	Nilai Nelayan/Tukar NTN (116,00
	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	30.614,37
	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan/NTPi	111,20
Meningkatkan daya saing dan pemasaran produk hasil perikanan	peningkatan jumlah Produk olahan hasil perikanan (ton)	13.200
Meningkatkan kualitas pengawasan, perencanaan, pengelolaan, dan keuangan pembangunan yang terpadu dan akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	BB
	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100

Dengan tercapainya sasaran yang ditargetkan maka akan mempercepat terwujudnya Tujuan Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan, yang akan berkontribusi pada pencapaian Visi dan Misi Provinsi Kepulauan Riau. Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 diimplementasikan ke dalam 6 (Enam) program pembangunan kelautan dan perikanan, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
2. Program Pengelolaan Kelautan dan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
3. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
4. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
5. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
6. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Selanjutnya Program dimaksud dijabarkan ke dalam 16 kegiatan yang didukung oleh APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 sebesar **Rp. 69.852.198.766,00** dengan komposisi : Anggaran pendukung langsung pencapaian Sasaran Strategis sebesar **Rp. 31.706.597.577,94** dan anggaran pendukung tidak langsung (administrasi perkantoran) sebesar **Rp 38.145.601.188,06**. Masing-masing program kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam uraian kegiatan indikator hasil kinerja dan rencana tingkat capaian (target).

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kerja pegawai (SKP).

Tabel 2.3. Anggaran Program pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kep. Riau Tahun Anggaran 2024

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Rp 38.145.601.188,06	APBD-P
2.	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Rp 432.682.670	APBD-P
3.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp 23.674.205.828,93	APBD-P
4.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp 4.950.650.657,01	APBD-P
5.	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Rp 1.667.398.387,00	APBD-P
6.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp 981.660.035,00	APBD-P
TOTAL		Rp 69.852.198.766,00	

Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau yang ditandatangani oleh Gubernur Kepulauan Riau dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 sebelum Perubahan Anggaran dan sesudah Perubahan Anggaran dapat dilihat pada lampiran.

Selain itu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2024 juga Satuan Kerja Tugas Pembantuan yang bersumber dari APBN dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.4. Anggaran Tugas Pembantuan pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi
Kep. Riau Tahun Anggaran 2024

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Satuan Kerja Tugas Pembantuan 690955(Sekretariat Jenderal)	Rp 232.627.000,00
2.	Satuan Kerja Tugas Pembantuan 329088 (Ditjen Perikanan Budidaya)	Rp 249.691.000,00
3.	Satuan Kerja Tugas Pembantuan 691000 (Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan)	Rp 178.252.000,00
4.	Satuan Kerja Tugas Pembantuan 691038 (Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan)	Rp 259.578.000,00
5.	Satuan Kerja Tugas Pembantuan 691076 (Ditjen Pengelolaan Ruang Laut)	Rp 558.800.000,00
6.	Satuan Kerja Tugas Pembantuan 329087 (Ditjen Perikanan Tangkap)	Rp 343.681.000,00
TOTAL		Rp 1.822.629.000

B A B I I I

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Pengukuran Kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk persentase persentase. Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi sebagai berikut :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik

$$\text{Tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Untuk memudahkan mendapatkan gambaran umum capaian kinerja sasaran secara keseluruhan dilakukan kategori capaian kinerja berdasarkan skala ordinal pengukuran kinerja yaitu sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.1. Skala Ordinal Pengukuran Kinerja Utama

NO	RENTANG CAPAIAN	KETERANGAN
1.	Capaian $\geq 91\%$	Sangat Tinggi (ST)
2.	$76\% \geq \text{capaian} < 90\%$	Tinggi (T)
3.	$66\% \geq \text{capaian} < 75\%$	Sedang (S)
4.	$51\% \geq \text{capaian} < 65\%$	Rendah (R)
5.	Capaian $< 50\%$	Sangat Rendah (SR)

Setiap indikator kinerja yang telah dilakukan pengukuran, selanjutnya dilakukan analisis capaian kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang diantaranya membandingkan antara realisasi kinerja Tahun ini dengan Tahun sebelumnya.

1.2. Capaian Kinerja Tahun 2024

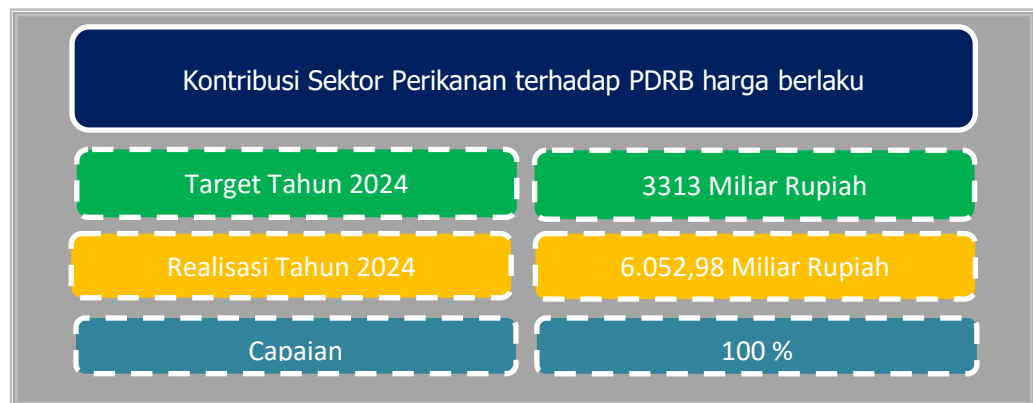
Pengukuran terhadap Tingkat Capaian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 dilakukan dengan dengan membandingkan antara Target Pencapaian Indikator Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 dengan realisasinya.

Adapun Pencapaian tujuan dan sasaran dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

TUJUAN : "OPTIMALISASI KUALITAS PEREKONOMIAN SEKTOR PERIKANAN"

Tingkat keberhasilan tujuan ini diukur melalui indikator kinerja yaitu Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB harga berlaku. Perkembangan capaian indikator kinerja tujuan adalah sebagaimana tabel berikut :

Gambar 3.1 Capaian Indikator Kinerja Tujuan Terhadap Target

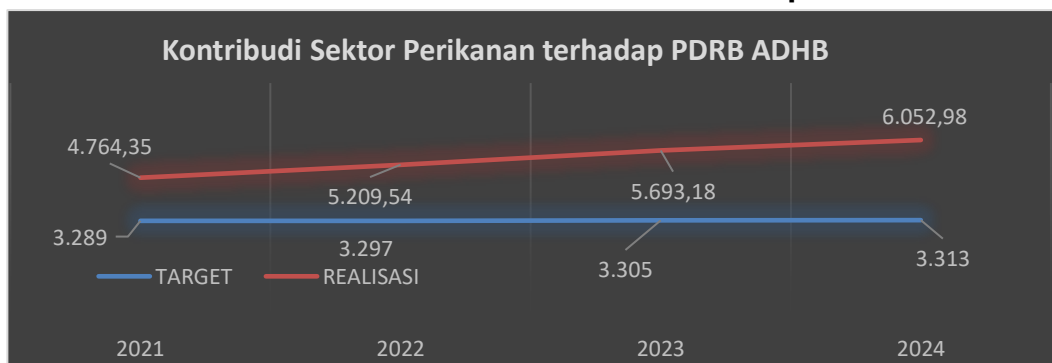


** Angka Sangat Sementara*

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor perikanan adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perikanan. Pertumbuhan ekonomi sektor perikanan merupakan perubahan PDRB (atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha) sektor perikanan dari satu periode ke periode berikutnya (dalam miliar rupiah). PDRB sektor perikanan tersebut hanya didasarkan pada sektor primer yang mencakup perikanan tangkap dan perikanan budidaya Berdasarkan data BPS Provinsi Kepulauan Riau serta mencakup kegiatan perikanan ini adalah jasa yang menunjang kegiatan perikanan atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak.

Grafik 3.1. Tren Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB ADHB



** Capaian kontribusi tahun 2024 masih menggunakan angka sangat sangat sementara*

Selanjutnya untuk indikator sasaran tingkat capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 berdasarkan hasil pengukurannya secara ringkas dapat dilihat pada uraian berikut :

Tabel 3.2. Pencapaian Indikator Kinerja pada Dinas Kelautan dan Perikanan Prov.Kepulauan Riau Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
Mengembangkan dan mengelola kawasan strategis industri sektor perikanan					
1	Kawasan Konservasi yang Dikelola Minimum	Kawasan	4	4	100
2	Persentase kasus IUU Fishing/konflik pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang diselesaikan	%	90	100	111,11
Meningkatkan produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap serta meningkatkan kapasitas nelayan terkait teknologi kelautan perikanan					
1	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)	Ton	308.305,60	335.255,75	108,74
2	Nilai Nelayan/Tukar NTN	Angka	116	105,28	90,76
3	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	30.614	39.898	130,32
4	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan/NTPi	Angka	111,2	96,69	86,95
Meningkatkan daya saing dan pemasaran produk hasil perikanan					
1	Jumlah produk olahan hasil perikanan (ton)	Ton	13.200	19.692,58	149,19
Meningkatkan kualitas pengawasan, perencanaan, pengelolaan, dan keuangan pembangunan yang terpadu dan akuntabel					
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	BB	BB	100
2	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100,00	100,00	100

Adapun analisis capaian kinerja per sasaran strategis pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut :

Sasaran I :
Mengoptimalkan Pengelolaan dan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

Tabel 3.3. Pengukuran Capaian Sasaran I

INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
Kawasan Konservasi yang Dikelola minimum	Kawasan	4	4	100 %	Sangat Tinggi
Persentase kasus IUU Fishing/konflik pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang diselesaikan	%	90	100	111,11 %	Sangat Tinggi

Sasaran kinerja untuk indikator kawasan konservasi yang dikelola secara minimum terealisasi sebanyak 4 kawasan pada Tahun 2024 dari target sebanyak 4 kawasan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 dengan tingkat persentase sebesar 100%.

Tabel 3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2023 pada Sasaran I

INDIKATOR SASARAN	SATUAN	2023	2024	PERSENTASE NAIK/TURUN
Kawasan Konservasi yang Dikelola secara minimum	Kawasan	4	4	0
Persentase kasus IUU Fishing/konflik pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang diselesaikan	%	100	100	0

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Kawasan Konservasi yang dikelola secara minimum oleh Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2024 sebanyak 4 kawasan sama dengan capaian pada tahun 2023. Hal ini merupakan upaya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam mengelola kawasan konservasi perairan yang telah dicadangkan pada 4 kawasan yaitu kawasan konservasi di Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna dan Kota Batam. Selain itu, pada tahun 2024 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga telah berhasil melaksanakan tahapan pengusulan pencadangan kawasan konservasi Bintan II yang selanjutnya ditetapkan menjadi kawasan konservasi perairan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2024 tentang Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Bintan II Provinsi Kepulauan Riau setelah sebelumnya kawasan Bintan I telah ditetapkan pada tahun 2022.

Selanjutnya dalam upaya memenuhi target pada Kawasan Konservasi yang dikelola minimum pada Tahun 2024 telah dilaksanakan pengambilan data sosial ekonomi dan biofisik dalam penyusunan dokumen awal serta pelaksanaan rapat-rapat antar pihak terkait sebelum diusulkan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan RI yang tertampung anggarannya pada sub kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta dukungan APBN melalui Program Kualitas Lingkungan Hidup pada Satuan Kerja Tugas Pembantuan 691076 (Ditjen Pengelolaan Ruang Laut). Untuk kedepannya, kawasan konservasi perairan yang dikelola secara minimum dapat ditingkatkan levelnya menjadi dikelola secara optimal sehingga tujuan pengelolaan dapat berjalan secara adaptif melalui penyusunan kebijakan dan strategi pengelolaan, pembangunan infrastruktur, inisiasi kerjasama antar berbagai pihak dan pelaksanaan sosialisasi edukasi kepada masyarakat pesisir sehingga dapat lebih berperan dalam mengoptimalkan pengelolaan Kawasan konservasi perairan di Provinsi Kepulauan Riau.

Selanjutnya, penanganan kasus IUU fishing/konflik pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang ditangani pada tahun 2024 ada sebanyak 34 kasus terdiri dari kasus konflik zona penangkapan ikan kasus penimbunan mangrove, konflik kerusakan terumbu karang dan konflik pencemaran air laut akibat aktivitas *cut and fill* serta konflik lintas batas. Penanganan kasus yang ditangani juga merupakan hasil kerjasama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan beberapa pihak meliputi Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, TNI AL, Polair, dan Bakamla serta Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang merupakan binaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau serta seluruh elemen masyarakat.

Pada indikator sasaran Persentase kasus IUU Fishing/konflik pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang diselesaikan pada Tahun 2024 memiliki target sebesar 90%. Dapat dilihat pada Tabel 3.4. bahwa tingkat capaian dari indikator Persentase kasus IUU Fishing/konflik pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang diselesaikan adalah sebesar 100% sehingga persentase indikator dimaksud mencapai 111,11%. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2023, dimana target 90% dan realisasi sebesar 100% sehingga capaiannya sebesar 111,11%. Dengan demikian capaian pada tahun 2024 sama dengan tahun 2023. Pencapaian ini merupakan perwujudan dari sinergitas antara pihak terkait dalam melaksanakan pengawasan yang terstruktur.

Untuk mendukung pencapaian Indikator Persentase kasus IUU Fishing/konflik pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang diselesaikan telah dilaksanakan beberapa kegiatan antara lain patroli menggunakan kapal pengawas di seputaran perairan Provinsi Kepulauan Riau, melakukan pengecekan dokumen dan persyaratan izin usaha bidang kelautan dan perikanan (HPKD dan SLO) serta menindaklanjuti laporan/aduan dari masyarakat yang tertampung penganggarannya pada kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil yang bersumber dari APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 serta dukungan APBN pada Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan Satuan Kerja Tugas Pembantuan 691000 (Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan). Optimalisasi jangkauan pengawasan di sekitar perairan Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari 96% lautan sangat dipengaruhi dengan ketersediaan BBM (Bahan Bakar Minyak) untuk operasi kapal patroli, sehingga dukungan anggaran untuk penyediaan BBM menjadi salah satu tolak ukur pencapaian pengawasan yang lebih baik. Selain itu, peran dan kontribusi dari Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang aktif juga menjadi ujung tombak pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, sehingga kedepannya Pemerintah Provinsi berupaya untuk membina dan mengoptimalkan lebih banyak kelompok masyarakat pengawas.

Sasaran II :

Meningkatkan produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap serta meningkatkan kapasitas nelayan terkait teknologi kelautan perikanan

Pencapaian pembangunan melalui produksi perikanan terdiri dari perikanan tangkap dan perikanan budidaya yang didukung dengan pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil serta pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan. Pencapaian produksi perikanan tangkap dan budidaya serta Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5. Pengukuran Capaian Sasaran II

INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI**	CAPAIAN	KATEGORI
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	308.305,60	335.255,75	108,74	Sangat Tinggi
Nilai Tukar Nelayan/NTN	Nilai	116	105,28	90,76	Tinggi
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	30.614	39.898	130,32	Sangat Tinggi
Nilai Tukar Pembudidaya Ikan/ NTPi	Nilai	111,2	96,69	86,95	Tinggi

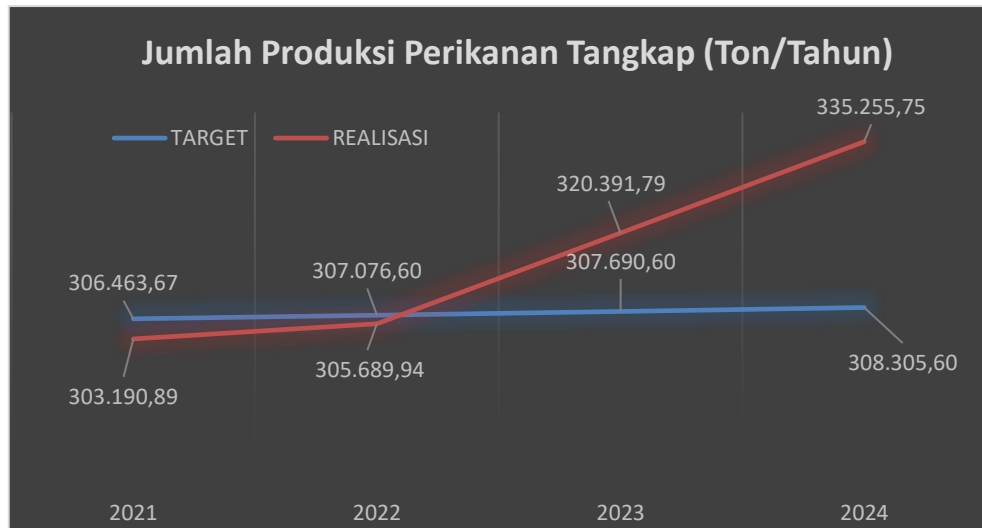
** Angka Sementara (Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri Tahun 2025)

Tabel 3.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2024 pada Sasaran II

INDIKATOR SASARAN	SATUAN	2023	2024**	PERSENTASE NAIK/TURUN
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	320.391,79	335.255,75	8,74%
Nilai Tukar Nelayan/NTN	Nilai	104,14	105,28	1,09%
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	31.250,00	39.898	27,67%
Nilai Tukar Pembudidaya Ikan/ NTPi	Nilai	96,08	96,69	0,63%

** Angka Sementara (Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri Tahun 2025)

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa indikator sasaran pada jumlah produksi perikanan tangkap dengan target 308.305,6 ton telah terealisasi sebesar 335.255,75 ton serta indikator Nilai Tukar Nelayan (NTN) dengan target sebesar 116 memiliki realisasi sebesar 105,28 pada Tahun 2024. Sedangkan indikator sasaran Jumlah produksi perikanan budidaya dengan target sebesar 30.614 Ton telah terealisasi sebesar 39.898 ton serta indikator Nilai Tukar Pembudidaya Ikan dengan target sebesar 111,2 memiliki realisasi sebesar 96,69%.



Grafik 3.2. Tren Jumlah Produksi Perikanan Tangkap

Jumlah produksi perikanan tangkap tahun 2024 sebesar 335.255,75 ton, meningkat 8,74 % jika dibandingkan dengan jumlah produksi perikanan tangkap tahun 2023 sebesar 320.391,79 ton, dengan pencapaian target pada dokumen Renstra Perangkat Daerah tahun 2024 periode 2021-2026 yang tercapai. Adapun jumlah produksi perikanan tangkap tahun 2024 didominasi oleh 5 (lima) jenis ikan yakni Kuwe, Kerapu Karang, Anggoli, Bambang dan Kakap Merah. Data produksi perikanan tangkap tahun 2024 masih bersifat angka sangat sementara, yang secara bertahap akan di validasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI bersama Dinas yang membidangi sektor perikanan 7 kab/kota di Kepulauan Riau.

Berdasarkan tren 4 tahun terakhir, produksi perikanan tangkap tiap tahunnya cenderung meningkat khususnya kondisi pasca pandemi covid-19, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah faktor, antara lain :

1. Adanya pendampingan dari Tim Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau untuk hadir dalam memberikan sosialisasi dan *updating* terkait peraturan dan regulasi yang berlaku terkait kebijakan pemerintah terkait Penangkapan Ikan Terukur (PIT);
2. Petugas pendataan produksi hasil tangkapan ikan yang berperan dalam melakukan pendataan ikan hasil tangkapan termasuk mencatat jumlah berat ikan hasil tangkapan yang telah ditimbang, sehingga pencatatan produksi dapat lebih optimal;
3. Fasilitasi perizinan, Tim Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau juga berupaya memberikan pelayanan yang optimal terhadap pengurusan perizinan perikanan tangkap kepada pelaku usaha perikanan tangkap atau para nelayan;
4. Menjadikan prakiraan cuaca menjadi salah satu perhatian dalam melaksanakan aktivitas penangkapan ikan, sehingga para nelayan dapat mengantisipasi cuaca yang kurang baik;
5. Pulihnya aktivitas perekonomian pasca pandemi Covid-19, sehingga siklus penangkapan ikan dan pasca produksinya telah berjalan sebagaimana mestinya, hal ini berdampak pada akses dan biaya operasional yang sudah mulai stabil.



Grafik 3.3. Perbandingan Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Nasional

Untuk pencapaian nasional, jumlah produksi perikanan tangkap tahun 2024 tercatat sebesar 5.360.000,00 ton dengan kondisi data triwulan III tahun 2024. Jika dibandingkan dengan pencapaian jumlah produksi perikanan tangkap Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 sebesar 329.269,44 ton, maka Provinsi Kepulauan Riau berhasil berkontribusi sebesar 6,15% terhadap pencapaian nasional (angka sangat sementara). Sedangkan untuk tahun 2023 Provinsi Kepulauan Riau berkontribusi sebesar 4,35% dari total produksi perikanan tangkap sebesar 320.391,79 ton. Berdasarkan kondisi ini Provinsi Kepulauan Riau berada pada urutan ke 8 dalam hal kontribusi jumlah produksi perikanan tangkap tahun 2023, di bawah Provinsi Jawa Timur, Maluku, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Jawa Tengah, Sumatera Utara dan Maluku Utara pada urutan 1 sampai dengan 7.

Selanjutnya, perlu dilaksanakan upaya-upaya strategis dalam upaya menjaga konsistensi jumlah produksi perikanan tangkap dalam pemenuhan target kinerja dengan tetap mengedepankan keberlanjutan ekosistem laut sebagaimana konsep Ekonomi Biru (*Blue Economy*) melalui penyediaan pelabuhan perikanan dengan fasilitas yang memadai mengingat sampai dengan saat ini Provinsi Kepulauan Riau belum memiliki pelabuhan perikanan yang terfasilitasi dan terstandarisasi. Selain itu pemetaan zona penangkapan ikan, perbaikan sumberdaya habitat ikan di laut melalui pembangunan rumah ikan (*Fish apartment*) guna mendukung reproduksi ikan sehingga dapat meningkatkan potensi sumber daya ikan di laut, penerapan aturan dalam penggunaan alat tangkap yang dilarang oleh peraturan perundangan serta sosialisasi pengelolaan SDI (Sumber Daya Ikan) yang berkelanjutan serta memberikan bantuan pelayanan pengurusan dokumen perizinan kapal penangkapan ikan agar nelayan dapat beroperasi secara maksimal terkait sarana yang digunakan layak secara teknis dan lengkap administrasinya sehingga dapat mengurangi tindak *illegal fishing*.

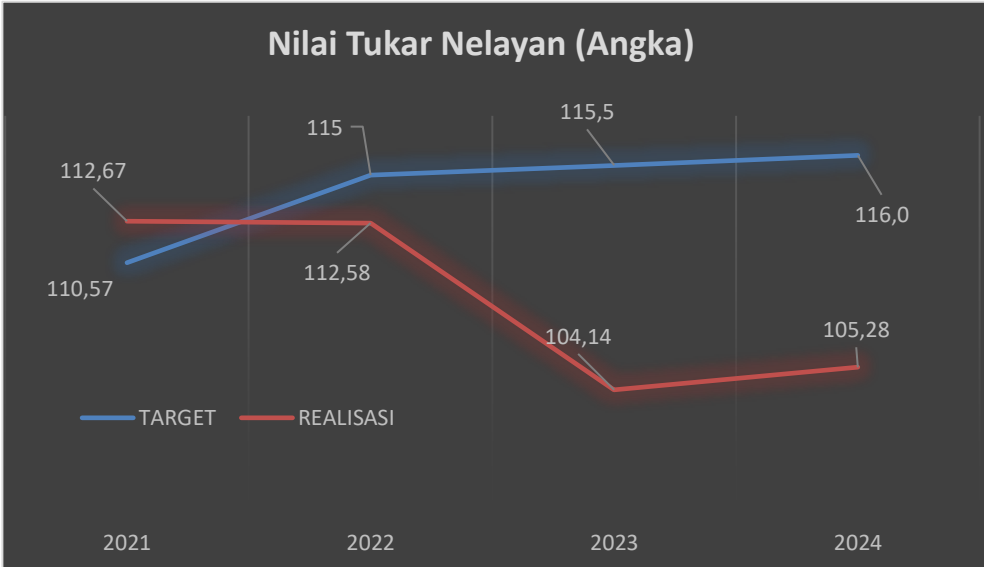
Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan nelayan/pembudidaya ikan yang dihitung dari Indeks Harga yang diterima nelayan/pembudidaya dibagi dengan Indeks Harga yang dibayar nelayan/pembudidaya, baik untuk kebutuhan rumah tangga, maupun untuk biaya produksi.

Tabel 3.7. Realisasi Nilai Tukar Nelayan

INDIKATOR SASARAN	SATUAN	2023	2024				PERSENTASE NAIK/TURUN
		REALISASI	TARGET	REALISASI	%	KAT	
Nilai Tukar Nelayan/NTN	Nilai	104,14	116,00	105,28	90,76	Tinggi	1,09

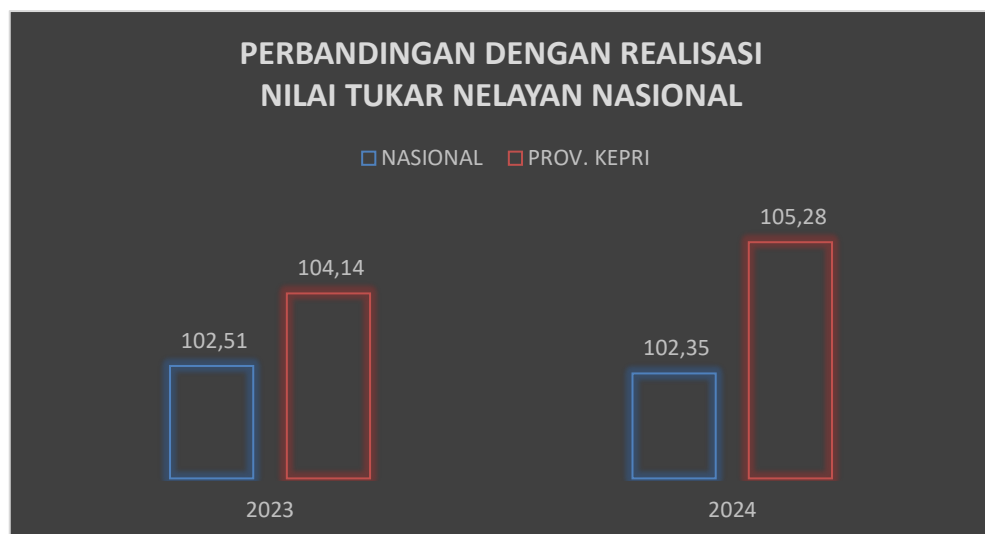
Nilai Tukar Nelayan (NTN) tahun 2024 apabila dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 1,09%, namun jika dibandingkan dengan target untuk tahun 2024 pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 realisasi Nilai Tukar Nelayan (NTN) masih belum dapat mencapai target yang sudah ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa secara rata-rata nelayan di Provinsi Kepulauan Riau mengalami peningkatan pendapatan yang tidak begitu signifikan sebesar 1,09% dibanding tahun 2023 namun masih belum dapat memperoleh pendapatan atau surplus sesuai dengan yang diharapkan walaupun secara perhitungan nelayan masih mengalami surplus/keuntungan dari pengeluarannya. Hal ini juga didasari oleh biaya produksi dan konsumsi yang dikeluarkan oleh nelayan semakin tinggi sedangkan harga jual ikan hasil tangkapan mengalami penurunan harga.

Grafik 3.4. Tren Nilai Tukar Nelayan (NTN)



Berdasarkan grafik di atas, Nilai Tukar Nelayan (NTN) 4 tahun terakhir cenderung fluktuatif dengan trend yang menurun dan tidak dapat diprediksi. Salah satu penyebabnya adalah adanya kenaikan harga pada biaya produksi dan konsumsi beberapa tahun terakhir sehingga biaya yang dikeluarkan oleh nelayan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari juga turut meningkat. Hal ini tidak ada korelasinya dengan jumlah produksi perikanan tangkap yang menunjukkan tren kenaikan dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, pemilihan lokasi kabupaten dan desa untuk dijadikan sampel perhitungan Nilai Tukar Nelayan (NTN) juga menjadi salah satu faktor penentu.

Grafik 3.5. Perbandingan Nilai Tukar Nelayan (NTN) Nasional



Pada pencapaian nasional, Nilai Tukar Nelayan (NTN) tahun 2024 tercatat senilai 102,35 sumber data BPS. Jika dibandingkan dengan pencapaian Nilai Tukar Nelayan (NTN) Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 senilai 105,28, maka pencapaian Provinsi Kepulauan Riau berhasil melebihi pencapaian nasional. Hal serupa juga terjadi pada tahun 2023, Nilai Tukar Nelayan (NTN) Provinsi Kepulauan Riau senilai 104,14 juga melebihi pencapaian nasional senilai 102,51. Berdasarkan kondisi ini Provinsi Kepulauan Riau berada pada urutan ke 15 dalam hal pencapaian Nilai Tukar Nelayan (NTN) tahun 2024, di bawah Provinsi DKI Jakarta dan Nusa Tenggara Barat pada urutan 13 dan 15. Sedangkan Papua Selatan berada pada urutan pertama dengan Nilai Tukar Nelayan (NTN) senilai 119,31.

Menyikapi beberapa hal tersebut di atas pada dasarnya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau telah berupaya untuk membantu masyarakat Provinsi Kepulauan Riau yang didominasi oleh nelayan kecil di tengah berbagai keterbatasan yang ada dengan memberikan bantuan sarana prasarana perikanan tangkap dan penyediaan premi asuransi BPJS Ketenagakerjaan. Bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024 serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Satuan Kerja Tugas Pembantuan 329087 (Ditjen Perikanan Tangkap). Melalui bantuan ini diharapkan para nelayan kecil dapat menjadi lebih mandiri dan sejahtera yang tentunya menjadi titik balik pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih positif baik di daerah maupun secara nasional sehingga ketahanan ekonomi menjadi semakin kuat.

Adapun bantuan yang diberikan kepada nelayan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8. Pemberian Bantuan Sarpras Perikanan Tangkap Tahun 2024

JENIS BANTUAN	JUMLAH OUTPUT	SATUAN	DISTRIBUSI KAB/KOTA
ASURANSI NELAYAN	31556	Orang	Seluruh Kab/Kota Prov. Kepri
SAMPAN KAYU DAYUNG	18	Unit	Bintan dan Batam
MESIN TEMPEL 15 PK	44	Unit	Batam, Tanjungpinang, Bintan, Lingga dan Karimun
RADIO	72	Unit	Natuna
MESIN TEMPEL 40 PK	6	Unit	Batam dan Lingga
MESIN KETINTING	26	Unit	Lingga dan Batam
GPS GARMIN 585 PLUS	2	Unit	Natuna dan Batam
KAPAL KAYU 5 GT DAN KELENGKAPANNYA	1	Unit	Bintan
BOAT PANCUNG KAYU DENGAN MESIN 40 PK	1	Unit	Bintan
JARING UDANG	1.440	Unit	Batam, Bintan, Lingga , Tanjungpinang dan Karimun
BUBU KETAM	10.980	Buah	Bintan, Batam, Tanjungpinang dan Lingga
KAWAT BUBU 18 kg	450	Gulung	Tanjungpinang, Lingga dan Bintan
JARING TENGGIRI	205	Pcs	Karimun, Batam dan Lingga
KAWAT BUBU	183	Gulung	Natuna, Anambas, Lingga,
PANCING ULUR	190	Unit	Natuna
KAWAT BUBU	97	Gulung	Natuna
JARING TANGSI 2 INCI	215	Pcs	Karimun, Tanjungpinang dan Lingga
PANCING ULUR	83	Unit	Natuna
JARING BAWAL	170	Pcs	Lingga dan Bintan

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri Tahun 2025

Tabel 3.9. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya

INDIKATOR SASARAN	SATUAN	2023	2024				PERSEN NAIK/TURUN
		REALISASI	TARGET	REALISASI	%	KAT	
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	31.250	30.614	39.897,94	130,32	Sangat Tinggi	27,67%

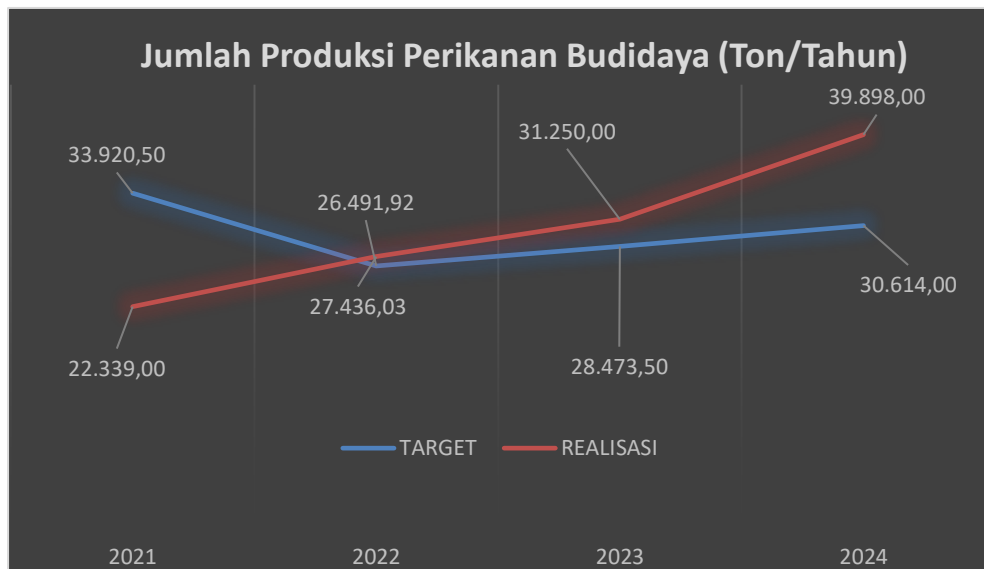
Jumlah produksi perikanan budidaya Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 sebesar 39.897,94 ton, meningkat 27,67% jika dibandingkan dengan produksi perikanan budidaya tahun 2023 sebesar 31.250 ton. Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan target untuk tahun 2024 pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 realisasi produksi perikanan budidaya telah berhasil mencapai target yang sudah ditetapkan dengan persentase sebesar 130,32 kategori Sangat Tinggi (ST). Hal ini mengindikasikan bahwa pembudidaya Provinsi Kepulauan Riau berhasil mengoptimalkan lahan pembudidaya ikan yang tersedia dengan melaksanakan aktivitas budidaya ikan.

Adapun jumlah produksi perikanan budidaya tahun 2024 yang berjumlah sebesar 39.897,94 ton terdiri dari produksi perikanan budidaya laut sebesar 21.668,74 ton, produksi perikanan budidaya payau sebesar 4.936,35 ton dan produksi perikanan budidaya tawar sebesar 13.292,85 ton. Total produksi perikanan budidaya tahun 2024 didominasi oleh 5 (lima) komoditas perikanan budidaya yang diantaranya terdiri dari Rumput Laut (*Eucheuma cottoni*), Lele (*Clariidae*), Kerapu (*Epinephelinae*) Udang Vaname (*Litopenaeus vannamei*) dan Patin (*Pangasiidae*).

Sama halnya dengan data produksi perikanan tangkap, data produksi perikanan budidaya tahun 2024 masih bersifat angka sementara yang secara bertahap akan divalidasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI bersama Dinas yang membidangi sektor perikanan 7 kab/kota di Kepulauan Riau.

Upaya yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau dalam pencapaian target kinerja adalah pemberian stimulan berupa paket hibah produksi perikanan budidaya, pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Benih Ikan untuk mendukung penyediaan benih bermutu, calon induk dan induk unggul yang bersertifikasi serta fasilitasi standar mutu, CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik) dan CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik) bagi unit usaha perikanan budidaya serta sosialisasi dan pembinaan kepada pembudidaya dan pembenihan ikan.

3.6. Grafik Tren Produksi Perikanan Budidaya



Berdasarkan tren 4 tahun terakhir, produksi perikanan budidaya tiap tahunnya mengalami peningkatan khususnya kondisi pasca pandemi covid-19, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah faktor, antara lain :

1. Memaksimalkan Kawasan budidaya di area ruang laut sebagaimana konsep klaster budidaya di Provinsi Kepulauan Riau.
2. Mulai digunakannya Budidaya Rumput laut dengan konsep industrialisasi dari hulu ke hilir.
3. Penyaluran hibah yang tepat sasaran.
4. Penambahan sarana dan prasarana budidaya yang meliputi Keramba Jaring Apung, benih serta pakan yang berkualitas.
5. Pendampingan terhadap kelompok oleh para penyuluh setempat dan personil Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri.
6. Penerapan teknik budidaya perikanan yang tepat dalam meminimalisir dampak pergantian musim (pancaroba) dan pengendalian terhadap hama penyakit ikan.



Grafik 3.7. Perbandingan Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Nasional

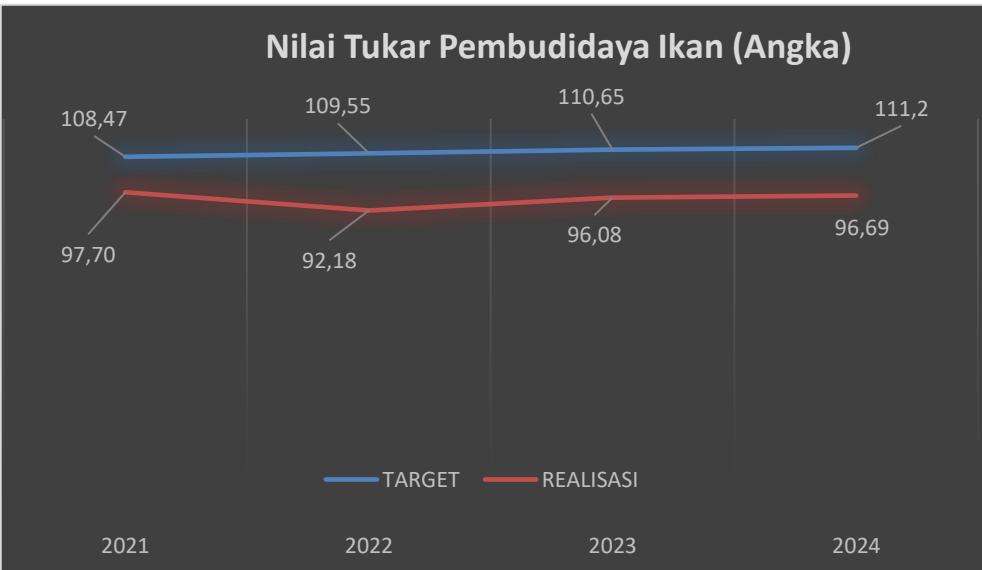
Untuk perbandingan dengan pencapaian nasional, jumlah produksi perikanan budidaya tahun 2024 tercatat sebesar 17.170.000,00 ton dengan kondisi data sementara tahun 2024. Jika dibandingkan dengan pencapaian jumlah produksi perikanan budidaya Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 sebesar 39.897,94 ton, maka Provinsi Kepulauan Riau berhasil berkontribusi sebesar 0,23% terhadap pencapaian nasional (angka sangat sementara). Sedangkan untuk tahun 2023 Provinsi Kepulauan Riau berkontribusi sebesar 0,18% atau sebesar 31.250,00 ton dari total produksi perikanan tangkap sebesar 16.976.518,00 ton. Berdasarkan kondisi ini Provinsi Kepulauan Riau berada pada urutan ke 29 dari total 33 Provinsi dalam hal kontribusi jumlah produksi perikanan budidaya tahun 2023, di bawah Provinsi Jambi dan Bali pada urutan 27 dan 28. Sedangkan Provinsi Sulawesi Selatan menjadi provinsi berkontribusi terbesar pada produksi perikanan budidaya tahun 2023 dengan total 4.116.724,00 Ton .

Selanjutnya, untuk tahun mendatang diperlukan upaya-upaya yang lebih konkret dalam mendukung peningkatan produksi perikanan budidaya, mengingat pengelolaan perikanan budidaya kedepan menjadi penopang produksi perikanan sebagaimana arah pengembangan kelautan dan perikanan oleh Pemerintah guna mendukung keberlanjutan habitat perikanan di laut. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan melakukan langkah-langkah meliputi pengendalian kualitas produksi perikanan budidaya melalui monitoring hama dan penyakit ikan, kandungan residu, lingkungan budidaya serta pemantauan peredaran dan pemakaian pakan dan obat ikan kimia dan biologi (OIKB), pengembangan kluster komoditas perikanan unggulan berpotensi ekspor, fasilitasi program peti koin bermantera dengan pemberian paket-paket bantuan berupa sarana budidaya perikanan, pengembangan kawasan agropolitan perikanan budidaya sehingga berdampak pada peningkatan produksi perikanan budidaya di Provinsi Kepulauan Riau

Tabel 3.10. Realisasi Nilai Tukar Pembudidaya Ikan

INDIKATOR SASARAN	SATUAN	2023	2024				PERSENTASE NAIK/TURUN
		REALISASI	TARGET	REALISASI	%	KAT	
Nilai Tukar Pembudidaya Ikan /NTPi	Nilai	96,08	111,2	96,69	86,95	Tinggi	0,63%

Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) tahun 2024 apabila dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,63%, namun jika dibandingkan dengan target untuk tahun 2024 pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 realisasi Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) Provinsi Kepulauan Riau masih jauh di bawah target yang telah ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa secara rata-rata pembudidaya ikan di Provinsi Kepulauan Riau mengalami peningkatan pendapatan yang tidak begitu signifikan sebesar 0,63% dibanding tahun 2023 namun pembudidaya ikan masih belum memperoleh surplus/keuntungan dari hasil usahanya karena pengeluaran untuk biaya rumah tangga dan produksi yang dikeluarkan lebih besar dari uang yang diperoleh dari menjual hasil budidayanya.

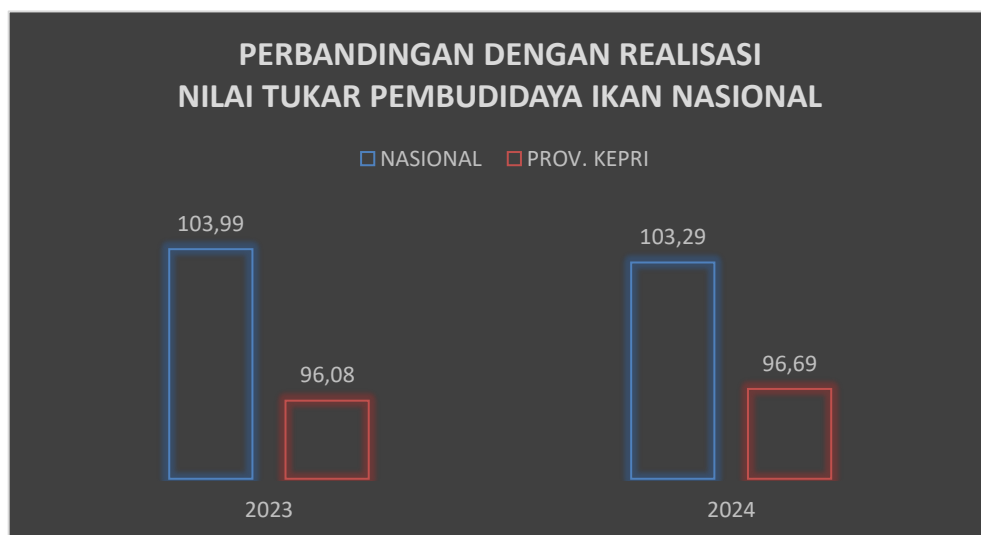


Grafik 3.8. Grafik Tren Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)

Dari data pada grafik di atas, Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) Provinsi Kepulauan Riau 4 tahun terakhir cenderung fluktuatif dan tidak pernah mencapai target pada Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026. Salah satu penyebabnya adalah sebagian besar usaha budidaya ikan di Kepulauan Riau bukan merupakan mata pencaharian utama, melainkan nelayan tangkap yang melakukan aktivitas budidaya ikan sebagai pekerjaan sampingan. Selain itu,

kenaikan harga pada biaya produksi dan konsumsi beberapa tahun terakhir sehingga biaya yang dikeluarkan oleh pembudidaya Ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari juga turut meningkat. Sama halnya dengan Nilai Tukar Nelayan (NTN), pada Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) juga tidak ada korelasinya dengan jumlah produksi perikanan budidaya yang menunjukkan tren kenaikan dalam beberapa tahun terakhir.

Grafik 3.9. Perbandingan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) Nasional



Untuk perbandingan dengan pencapaian nasional, Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) tahun 2024 tercatat senilai 103,29 sumber data BPS. Apabila dibandingkan dengan pencapaian Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 senilai 96,96, maka pencapaian Provinsi Kepulauan Riau masih di bawah pencapaian nasional. Hal serupa juga terjadi pada tahun 2023, Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) Provinsi Kepulauan Riau senilai 96,08 juga masih di bawah pencapaian nasional senilai 103,99. Berdasarkan kondisi ini Provinsi Kepulauan Riau berada pada urutan ke 27 dari total 37 Provinsi dalam hal pencapaian Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) tahun 2024, di bawah Provinsi Papua Barat Daya dan Banten pada urutan 25 dan 26. Sedangkan Provinsi Jawa Barat berada pada urutan pertama Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) dengan nilai 112,81.

Dalam mengoptimalkan pengelolaan perikanan budidaya, Dinas Kelautan dan Perikanan berupaya membantu aktivitas budidaya yang ada di wilayah Kepulauan Riau dengan memberikan bantuan sarana dan prasarana perikanan budidaya. Adapun bantuan yang diberikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2024 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Satuan Kerja Tugas Pembantuan 329088 (Ditjen Perikanan Budidaya). Adapun

bantuan yang diberikan kepada nelayan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.11. Pemberian Bantuan Sarpras Perikanan Budidaya Tahun 2024

JENIS BANTUAN	JUMLAH OUTPUT	SATUAN	DISTRIBUSI KAB/KOTA
Bibit Teripang Pasir	11038	Ekor	Kab. Lingga
Waring	1408	Meter	Kab. Lingga
Kayu Pancang	1000	Batang	Kab. Lingga
Karung Goni Plastik	5000	Buah	Kab. Lingga
Bibit Teripang	16796	Ekor	Kab. Lingga
Pakan Irawan	6595	Kg	Kab. Lingga
Bibit Teripang Pasir	13976	Ekor	Kab. Lingga
Benur Udang Vaname	243000	Ekor	Kab. Lingga
Tali Nilon	16	Gulung	Kab. Lingga
Jaring Keramba Apung	85	Unit	Kab. Bintan
Bibit Ikan Kerapu Cantang Ukuran (10-11 cm)	10200	Ekor	Kab. Bintan
Pakan Larva / Benih Ikan (Ukuran 1-5 mm)	1500	Kg	Kab. Bintan
Pakan Ikan	1800	Kg	Kab. Bintan
Pakan Larva / Benih Ikan Tahap 3	900	Kg	Kab. Bintan
Jaring Keramba Apung	50	Unit	Kota Batam
Ms. Prima Feed	7552	Kg	Kota Batam
Bibit Ikan Kerapu Cantang	3200	Ekor	Kota Batam
Jaring Keramba Tancap	1290	Kg	Kab. Natuna
Bibit Ikan Kerapu	4645	Ekor	Kab. Natuna
Bibit Ikan Kerapu Cantik	9290	Ekor	Kab. Natuna
Jaring Keramba Tancap	1410	Kg	Kab. Anambas
Jaring Keramba Tancap	1295	kg	Kab. Karimun
Jaring Keramba Apung	50	Unit	Kota Tanjungpinang

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri Tahun 2025

Sasaran III :

Meningkatkan daya saing dan pemasaran produk hasil perikanan

Tabel 3.12. Pengukuran Capaian Sasaran III

INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
Jumlah Produk olahan hasil perikanan (ton)	Ton	13.200	19.692,58	100%	Sangat Tinggi

** Angka Sementara (Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri Tahun 2025)

Tabel 3.13. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2023 pada Sasaran III

INDIKATOR SASARAN	SATUAN	2023	2024	PERSENTASE NAIK/TURUN
Jumlah Produk olahan hasil perikanan (ton)	Ton	18.099,33	19.692,58	8,80%

** Angka Sementara (Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri Tahun 2025)

Pada Tahun 2024 target indikator sasaran jumlah produk olahan hasil perikanan sebesar 13.200 Ton, yang berhasil terealisasi sebesar 19.692,58 Ton atau sebesar 100% dengan kategori Sangat Tinggi. Sedangkan apabila dibanding dengan dengan Tahun 2023 yang terealisasi sebesar 18.099,33 Ton, pencapaian indikator sasaran jumlah produk olahan hasil perikanan mengalami peningkatan sebesar 8,80%. Berdasarkan hasil analisa peningkatan capaian jumlah produk olahan hasil perikanan sebesar disebabkan karena berlakunya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2021 tentang Data Induk Produk Kelautan dan Perikanan yang juga mengatur klasifikasi produk-produk hasil olahan perikanan.

Selanjutnya, ikan sebagai bahan pangan di Indonesia memiliki beberapa keunggulan, diantaranya sebagai sumber nutrisi esensial, *white meat*, bersifat universal, harga relatif murah, proses produksi relatif singkat, serta *supply* lokal. Pada target Angka Konsumsi Ikan (AKI) di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 sebesar 65,17 kg/kap/tahun, namun sampai dengan saat ini pencapaian Angka Konsumsi Ikan (AKI) Provinsi Kepulauan Riau belum dapat disampaikan mengingat penetapan Angka Konsumsi Ikan (AKI) berdasarkan hasil Susenas (Sensus Sosial Ekonomi Nasional) baru akan dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik dan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI pada Semester II tahun berikutnya dengan demikian AKI Tahun 2024 baru ditetapkan pada Tahun 2025. Sementara itu, untuk capaian Angka Konsumsi Ikan (AKI) Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023 adalah sebesar 67,80 kg/kap/tahun, pencapaian ini berhasil melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 64,98 kg/kap/tahun, sedangkan AKI Nasional Tahun 2023 sebesar 57,61 kg/kap/tahun.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi mengelola produksi pengolahan hasil kelautan dan perikanan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Kelautan dan

Perikanan Provinsi Kepulauan Riau telah berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang manfaat mengonsumsi ikan melalui kampanye gemar makan ikan (GEMAR IKAN) dan lomba masak dengan bahan baku ikan di tingkat Provinsi dan Nasional serta memperbaiki logistik atau distribusi ikan serta meningkatkan koordinasi antar *stakeholder* terkait untuk melaksanakan pengawasan mutu serta keamanan pangan (*food safety*) hasil perikanan yang tertampung anggarannya pada Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang bersumber dari APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 serta dukungan APBN pada Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Satuan Kerja Tugas Pembantuan 691038 (Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan). Selain itu, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau juga memberikan bantuan berupa *Cooler Box* berkapasitas 220 Liter kepada pelaku usaha pengolahan produksi perikanan untuk mendukung produksi pengolahan pada tingkat UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) yang diharapkan para Unit Pengolahan Ikan (UPI) dapat menjadi lebih mandiri dan sejahtera untuk mendukung pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih positif. Adapun rincian bantuan sebagai berikut :

Tabel 3.14. Pemberian Bantuan Cooler Box Tahun 2024

JENIS BANTUAN	JUMLAH OUTPUT	SATUAN	JUMLAH PENERIMA BANTUAN	DISTRIBUSI KAB/KOTA
Cooler Box 220 Liter	60	Unit	60 Orang	Anambas
	186	Unit	54 Orang	Natuna

Sasaran IV :
Meningkatkan kualitas pengawasan, perencanaan, pengelolaan, dan keuangan pembangunan yang terpadu dan akuntabel

Tabel 3.15. Pengukuran Capaian Sasaran IV

INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	BB	BB (79,76)	100	Sangat Tinggi
Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100,00	100,00	100	Sangat Tinggi

Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri Tahun 2025

Akuntabilitas kinerja menggambarkan kemampuan instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan hasil atas penggunaan anggaran yang dilaksanakan. Dengan akuntabilitas kinerja membantu instansi pemerintah dalam memfokuskan sasaran pembangunan yang langsung dirasakan masyarakat, menetapkan ukuran keberhasilan atas pencapaian sasaran pembangunan dan memilih program dan kegiatan yang paling efektif dan efisien. Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (SAKIP). Untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerjanya tersebut, setiap tahun dilakukan evaluasi atas penerapan SAKIP oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Inspektorat Daerah pada seluruh Perangkat Daerah lingkup Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 3.16. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2023 pada Sasaran III

INDIKATOR SASARAN	SATUAN	2023	2024	PERSENTASE
Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	BB (75,35)	BB (79,76)	0
Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100,00	100,00	0

*Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri Tahun 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator sasaran "Meningkatkan Kualitas Pengawasan, Perencanaan, Pengelolaan, dan Keuangan Pembangunan Yang Terpadu Dan Akuntabel" pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau pada 2024 terealisasi dengan Nilai BB (79,76) atau kategori Sangat Tinggi dan apabila dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2023 Nilai BB (75,35) maka pencapaian terhadap sasaran berhasil dipertahankan.

Upaya strategis untuk dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan antara lain penyelarasan sistem perencanaan, penganggaran dan informasi kinerja, sosialisasi, asistensi dan konsultasi pelaksanaan kebijakan akuntabilitas kinerja, partisipasi dan komitmen seluruh level pimpinan dalam penyusunan perencanaan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja, peningkatan budaya kinerja, pengelolaan APBD berbasis kinerja dan prioritas daerah, pengintegrasian sistem anggaran, kegiatan dan kinerja organisasi dan pegawai berbasis teknologi informasi.

Sebagaimana nilai hasil evaluasi SAKIP pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa dalam rangka meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja masih perlu adanya peningkatan kualitas implementasi SAKIP khususnya terkait pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan pencapaian kinerja. Adapun komponen penilaian yang diperoleh dari hasil evaluasi SAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.17. Perbandingan Realisasi Kinerja 4 Tahun Terakhir pada Sasaran IV

NO	KOMPONEN YANG DINILAI	BOBOT	NILAI 2021	NILAI 2022	NILAI 2023	NILAI 2024
1	PERENCANAAN KINERJA	30	26,38	24,00	25,50	25,50
2	PENGUKURAN KINERJA	30	18,54	24,30	24,30	25,50
3	PELAPORAN KINERJA	15	12,20	11,10	10,05	12,00
4	EVALUASI INTERNAL	25	5,15	17,74	15,50	16,75
5	PENCAPAIAN SASARAN/ KINERJA ORGANISASI		11,33	20,00		
	Nilai Hasil Evaluasi	100	73,59	79,40	75,35	79,55
	Predikat Penilaian		BB	BB	BB	BB

Selanjutnya pada capaian Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor adalah 100% dari target sebesar 100%, pencapaian tahun ini juga sama dengan pencapaian pada Tahun 2023 yaitu sebesar 100%. Dalam mendukung pencapaian sasaran strategis “Meningkatkan kualitas pengawasan, perencanaan, pengelolaan, dan keuangan pembangunan yang terpadu dan akuntabel” dan indikatornya, Dinas Kelautan dan Perikanan memperoleh alokasi anggaran melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.

3.2. Akuntabilitas Anggaran

Realisasi Anggaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2024 dijabarkan sebagai berikut :

1. Pagu yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 sebesar **Rp 69.852.198.766,00** dengan rincian anggaran pendukung langsung pencapaian Sasaran Strategis sebesar **Rp 31.706.597.577,94** sedangkan anggaran pendukung tidak langsung (administrasi perkantoran) sebesar **Rp 38.145.601.188,06**.
2. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 adalah sebesar **Rp 67.666.654.729,83** dengan rincian realisasi anggaran pendukung langsung pencapaian Sasaran Strategis sebesar **Rp 31.026.805.399,83** sedangkan realisasi anggaran pendukung tidak langsung (administrasi perkantoran) sebesar **36.639.849.330,00**.

Berikut rincian alokasi anggaran dan realisasi keuangan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024.

Tabel 3.18. Anggaran dan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2024

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI*	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	38.145.601.188,06	36.639.849.330,00	96,05
2	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	432.682.670	397.662.602,00	91,91
3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	23.674.205.828,93	23.348.532.332,83	98,62
4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	4.950.650.657,01	4.763.757.011,00	96,22
5	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.667.398.387,00	1.550.334.546	92,98
6	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	981.660.035,00	966.518.908,00	98,46
	TOTAL	69.852.198.766,00	67.666.654.729,83	96,87

* Nilai realisasi keuangan masih *unaudited*

Tabel 3.19. Anggaran dan Realisasi pada masing-masing Sub Unit Kerja

NO	SUB UNIT KERJA	ANGGARAN	REALISASI*	%
1	SEKRETARIAT	30.573.430.543,06	29.904.521.799,00	97,81
2	BIDANG KELAUTAN, KONSERVASI DAN PENGAWASAN	1.380.119.912,00	1.237.658.544,00	89,68
3	BIDANG PERIKANAN TANGKAP	23.175.492.739,93	22.893.224.214,83	98,78
4	BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA	3.930.384.513,01	3.770.632.711,00	95,94
5	BIDANG PENGOALAHAN DAN PEMASARAN	910.863.735,00	895.837.554,00	98,35
6	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ANAMBAS	400.886.878,00	342.938.541,00	85,54
7	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NATUNA	956.588.944,00	927.218.516,00	96,93
8	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN LINGGA	1.006.371.797,00	970.726.423,00	96,46
9	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KARIMUN	1.168.654.562,00	1.139.056.602,00	97,47

NO	SUB UNIT KERJA	ANGGARAN	REALISASI*	%
10	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM	922.960.472,00	913.970.332,00	99,03
11	UPTD BALAI BENIH IKAN	2.353.667.721,00	2.258.445.208,00	95,95
12	UPTD BALAI PENGUJIAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	678.841.381,00	676.799.848,00	99,70
13	UPTD BALAI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI	2.393.935.568,00	1.738.199.443,00	72,61
	TOTAL	69.852.198.766,00	67.669.229.735,83	96,87

* Nilai realisasi keuangan masih *unaudited*

Selanjutnya, dalam melaksanakan kegiatan pembangunan bidang kelautan dan perikanan di Provinsi Kepulauan Riau yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau juga memperoleh alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024 melalui Satuan Kerja (Satker) Tugas Pembantuan Provinsi sebesar **Rp. 1.822.629.000**. Anggaran dimaksud dialokasikan kepada 6 Satuan Kerja Tugas Pembantuan. Selanjutnya dari pagu yang tersedia, telah terealisasi sebesar **Rp. 1.791.963.131**.

Adapun rincian pagu dan realisasi APBN pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai berikut :

Tabel 3.19. Anggaran dan Realisasi APBN T.A. 2024

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1.	Satuan Kerja Tugas Pembantuan 690955(Sekretariat Jenderal)	232.627.000,00	231.942.436	99,71
2.	Satuan Kerja Tugas Pembantuan 329088 (Ditjen Perikanan Budidaya)	249.691.000,00	249.641.300	99,98
3.	Satuan Kerja Tugas Pembantuan 691000 (Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan)	178.252.000,00	178.229.400	99,99
4.	Satuan Kerja Tugas Pembantuan 691038 (Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan)	259.578.000,00	259.250.821	99,87
5.	Satuan Kerja Tugas Pembantuan 691076 (Ditjen Pengelolaan Ruang Laut)	558.800.000,00	530.498.764	94,94
6.	Satuan Kerja Tugas Pembantuan 329087 (Ditjen Perikanan Tangkap)	343.681.000,00	342.400.410	99,63
	TOTAL	1.822.629.000	1.791.963.131	98,32

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024, merupakan salah satu bentuk perwujudan pertanggungjawaban Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau menuju *Good Governance* dan *Clean Governance*. Laporan Kinerja ini disusun sebagai tindak lanjut dari Perpres 29/2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Permenpan No.53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dari 9 Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau yang targetnya telah ditetapkan pada awal tahun 2024 terdapat Indikator Kinerja yang targetnya tercapai >100% sebanyak 6 Indikator dan 2 indikator < 90%. Permasalahan yang mempengaruhi pencapaian target tersebut selanjutnya akan menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya.

Dari hasil Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau dapat disimpulkan sebagai berikut :

1) Adapun capaian sasaran dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Secara keseluruhan pencapaian Sasaran I telah mencapai target, dengan pencapaian 4 kawasan konservasi yang dikelola dan 100% kasus IUU Fishing/konflik pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang diselesaikan.
- b) Pada sasaran II, capaian indikator Nilai Tukar Nelayan dan Nilai Tukar Pembudidaya masih belum memenuhi target yang ditetapkan, dengan persentase perolehan capaian secara berurutan sebesar 90,76% dan 86,95%.
- c) Sasaran III telah melebihi target yang telah ditetapkan, Peningkatan jumlah produk olahan hasil perikanan telah terealisasi sebesar 19.692,58 Ton atau setara dengan mencapai lebih 100%.
- d) Sasaran IV, tercapainya Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan predikat BB dan Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor 100%

- 2) Rata-rata persentase hasil capaian kinerja sasaran pada tahun 2024 adalah 108,56%, hal tersebut menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik namun masih belum merata antar indikator kinerja dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2024.
- 3) Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar **69.852.198.766,00** dengan pagu anggaran APBD sebesar **Rp 67.669.229.735,83** atau sebesar **96,87%**.

Dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Kelautan dan perikanan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023 masih ditemui sejumlah kendala sebagai berikut :

1. Kebutuhan dan biaya operasional meningkat dipengaruhi oleh inflasi dan faktor ketersediaan BBM untuk nelayan yang menyebabkan frekuensi nelayan melaut menjadi menurun dan harus menambah dengan membeli BBM Industri.
2. Kebijakan PIT berdampak pada penurunan pendapatan nelayan tangkap dengan beban PNPB pada setiap hasil tangkapan sebesar 800 ribu sampai dengan 1 juta rupiah yang bergantung dengan hasil tangkapan nelayan.
3. Biaya pakan yang tinggi masih menjadi kendala bagi pembudidaya, pemberian paket hibah berupa mesin pellet masih belum menjangkau ke semua pembudidaya. Karakteristik kemampuan dan kemampuan kelompok dalam memproduksi pakan mandiri masih belum optimal. Rata-rata kelompok masih belum tertarik membuat pakan secara mandiri dengan alasan kesulitan waktu dan tenaga; pakan mandiri belum bisa menjadi substitusi pakan produksi pabrik.
4. Sebagian besar pembudidaya masih menerapkan teknologi konvensional dan belum menerapkan inovasi teknologi pada unit usaha budidaya.
5. Adanya serangan penyakit ikan pada usaha pembibitan dan pembesaran ikan yang sedang berkembang di keramba akibat dari kualitas air dan indikasi air laut yang tercemar yg menurunkan produktivitas budidaya.
6. Semakin berkembangnya tambak udang di Bintan mengakibatkan penurunan kualitas air yang mempengaruhi pemeliharaan benih dan berdampak pada produksi benih mengalami penurunan sehingga tidak terpenuhinya kebutuhan benih untuk pembesaran di KJA
7. Rentang kendali yang cukup luas mencakup kewenangan laut sampai dengan 12 mil, namun belum dapat diimbangi dengan sarana prasarana serta petugas pengawasan yang ada serta biaya operasional yang cukup (BBM).

8. Kompetensi pelaku industri perikanan skala UKM belum memadai untuk menghadapi persaingan di pasar global

4.2. Rekomendasi

LKjIP Tahun 2024 selain menyampaikan capaian pada tahun berjalan, juga membandingkan capaian indikator kinerja dengan tahun sebelumnya dan termasuk juga perbandingan serapan anggarannya. Untuk meningkatkan pencapaian kinerja kegiatan, maka hal-hal yang perlu diupayakan untuk tahun mendatang di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut :

1. Perlunya disusun peraturan/regulasi daerah sebagai turunan regulasi pemerintah dalam upaya memberi kepastian hukum terkait kegiatan penangkapan ikan.
2. Melakukan kajian dan pemetaan terkait penerapan penangkapan ikan terukur di wilayah Kepulauan Riau.
3. Memabangun dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelabuhan perikanan kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk mendukung kebijakan penangkapan ikan terukur serta usaha perikanan tangkap.
4. Tetap konsisten dalam menyediakan bantuan/hibah sarana dan prasarana penangkapan ikan maupun pembudidaya ikan skala kecil untuk membantu menekan biaya operasional atau modal yang dikeluarkan.
5. Membuka akses pasar domestik melalui acara bazar, gelar produk serta menyalurkannya pada kegiatan penyediaan pangan sehat berbasis ikan. Harapannya stok ikan yang belum dipanen dapat dimanfaatkan sehingga usaha budidaya tidak terhenti.
6. Sosialisasi dan monitoring terkait hama penyakit ikan kepada para pembudidaya ikan
7. Menjalin kerjasama dengan provinsi lain dan berbagai pihak sebagai upaya untuk mendorong Unit Pengolah Ikan (UPI) dapat memperoleh bahan baku ikan dan inovasi pengembangan produk kelautan dan perikanan serta berkoordinasi dengan KKP untuk mendapatkan akses dan informasi terkait pembinaan kepada pelaku ekspor hasil perikanan.
8. Mengoptimalkan kerjasama antara pengawas perikanan serta kelompok masyarakat pengawas dan membentuk satgas dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, kabupaten/kota dan aparat penegak hukum dalam penanganan pelanggaran/tindak pidana perikanan serta mediasi penyelesaian konflik nelayan.
9. Masih perlu ditingkatkan koordinasi dan komunikasi tentang perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan dengan pihak terkait, baik dengan Pemerintah

Kabupaten/Kota, Pemerintah Pusat agar pencapaian sasaran bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan;

10. Meningkatkan intensitas forum diskusi dan koordinasi antar bidang untuk lebih memahami tugas pokok dan fungsi, meningkatkan sinergitas program kegiatan antar sektor, peningkatan kualitas SDM, serta penyamaan persepsi mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan maupun evaluasi realisasi fisik serta realisasi keuangan;
11. Dalam merumuskan rencana anggaran perlu memperhatikan program/kegiatan prioritas, terutama yang mendukung tercapainya Visi : **"Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya"** yang telah tertuang dalam Indikator Kinerja Utama sehingga menjadi tolak ukur teknis pencapaian keberhasilan kegiatan pada tahun mendatang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, semoga dapat memacu pelaksanaan pembangunan sektor perikanan dan kelautan di Provinsi Kepulauan Riau, sehingga nantinya akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

LAMPIRAN



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : **Dr. Said Sudrajad, S.Sos., M.Si**

Jabatan : **Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau**

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Hj. Marlin Agustina, S.H.**

Jabatan : **Plt. Gubernur Kepulauan Riau**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 7 Oktober 2024

Pihak Kedua,

Plt. Gubernur Kepulauan Riau

Hj. Marlin Agustina, S.H.

Pihak Pertama,

**Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan
Provinsi Kepulauan Riau**

Dr. Said Sudrajad, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196905042000031008

LAMPIRAN

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap serta meningkatkan kapasitas nelayan terkait teknologi kelautan dan perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	308.305,60
		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	30.614,37
		Nilai Tukar Nelayan / NTN (%)	116
		Nilai Tukar Pembudidaya Ikan / NTPi (%)	111,20
2.	Mengembangkan dan mengelola kawasan strategis industri sektor perikanan	Kawasan Konservasi yang Dikelola (Kawasan)	4
		Persentase kasus IUU Fishing / konflik pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang diselesaikan (%)	90
3.	Meningkatkan daya saing dan pemasaran produk hasil perikanan	Peningkatan Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan (Ton)	13.200
4.	Meningkatkan kualitas pengawasan, perencanaan, pengelolaan, dan keuangan pembangunan yang terpadu dan akuntabel.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	BB

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 38.145.601.188,06	APBD-P
2. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Rp. 432.682.670,00	APBD-P
3. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp. 23.674.205.828,93	APBD-P
4. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp. 4.950.650.657,01	APBD-P

LAMPIRAN

	Program	Anggaran	Keterangan
5.	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Rp. 1.667.398.387,-	APBD-P
6.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp. 981.660.035,-	APBD-P

Tanjungpinang, 7 Oktober 2024

Pihak Kedua,
Plt. Gubernur Kepulauan Riau



Hj. Marlin Agustina, S.H.

Pihak Pertama,
Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan
Provinsi Kepulauan Riau



Dr. Said Sudrajad, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196905042000031008

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

📍 Bandar Seri Kota Piring Kawasan Perkantoran
Sultan Muhammad Riayat Syah Gedung Daeng Kamboja
Pulau Dompok